LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

2023

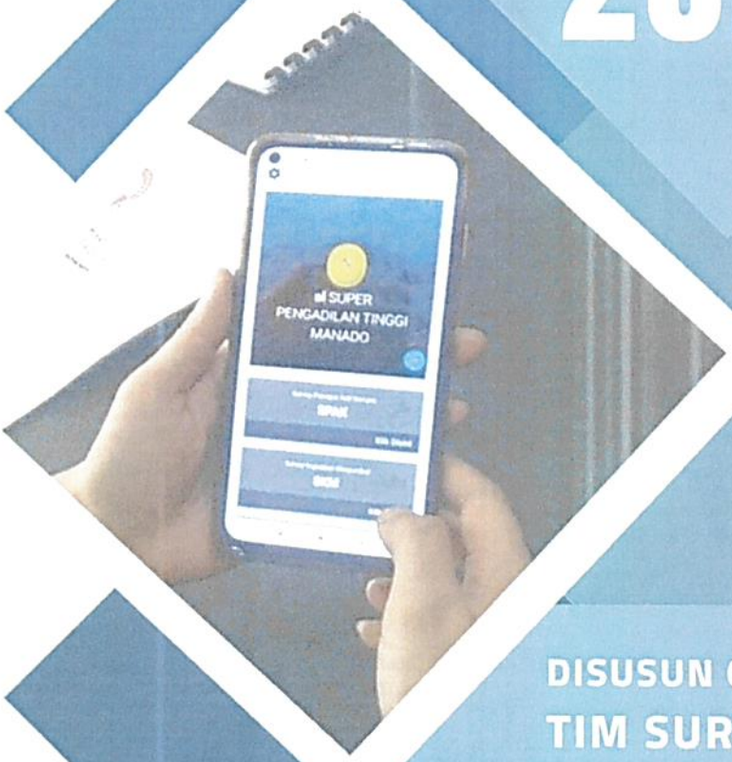

DISUSUN OLEH
TIM SURVEI

TRIWULAN II TAHUN 2023
Periode April - Juni 2023

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
DI PENGADILAN TINGGI MANADO

Triwulan II Tahun 2023

Periode April-Juni 2023

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Manado

Pada Hari Senin, 3 Juli 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

PENGADILAN TINGGI MANADO

Dr. YAPI, SH. MH.

DAFTAR ISI

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Maksud Dan Tujuan 4
1.3. Landasan Hukum 5
1.4. Rencana Kerja 5
BAB II 7
METODOLOGI 7
2.1. Metode Penelitian 7
2.2. Populasi Dan Sampel 7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 7
2.5. Teknik Analisis Data 8
2.6. Tahapan pelaksanaan 8
BAB III 10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 10
3.1. Profil responden 10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan 18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 19
BAB IV 20
PENUTUP 20
4.1. Kesimpulan 20
4.2. Rekomendasi 20

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, Pengadilan Tinggi Manado dapat melaksanakan survei terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Triwulan II Tahun 2023, untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Pengadilan Tinggi Manado.

Hasil survei ini akan dijadikan sebagai pertanggung jawaban atas Kinerja Tim Survei, maka disusun laporan, ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Tinggi Manado mempunyai komitmen dan tekat yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Tinggi Manado, sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bersih korupsi.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Triwulan II Tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 3 Juli 2023

Ketua Tim Survei

Marten Teny Pietersz, S.Sos., SH., MH.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Manado yang merupakan satuan kerja dalam melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

  Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  a. Kuesioner.
  b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  a. Jumlah Responden.
  b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan

penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Jadwal Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Manado/Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan

responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel A. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel B. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel C. Nilai Persepsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh data pengguna layanan sebanyak 78 Reponden dimana yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang dan perempuan 22 orang

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi (%)
Laki-laki	49	63
Perempuan	29	37

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

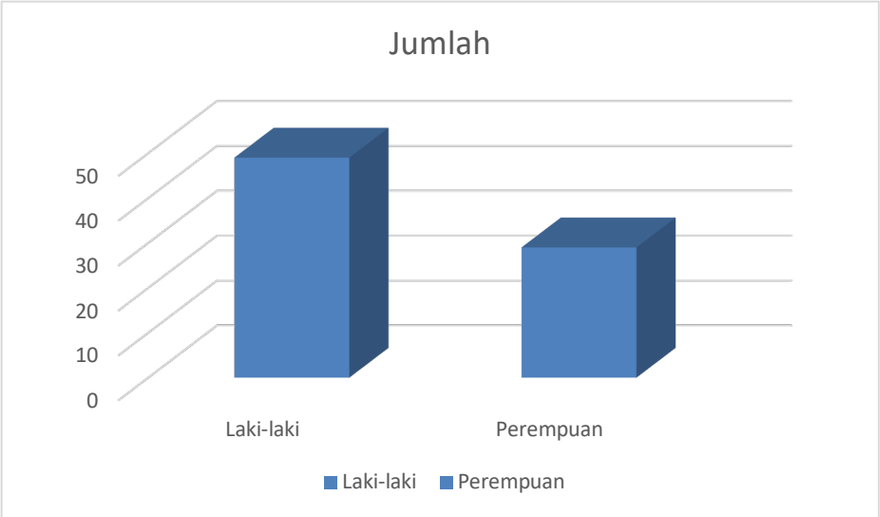

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

3.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Belakang Pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebesar 54%.

Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentasi (%)
Tidak / Belum Sekolah	0	0
SD	0	0
SMP	0	0
SMU	27	35
DIPLOMA 1	0	0
DIPLOMA 2	0	0
DIPLOMA 3	2	3
S1	42	54
S2	7	9
S3	0	0

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

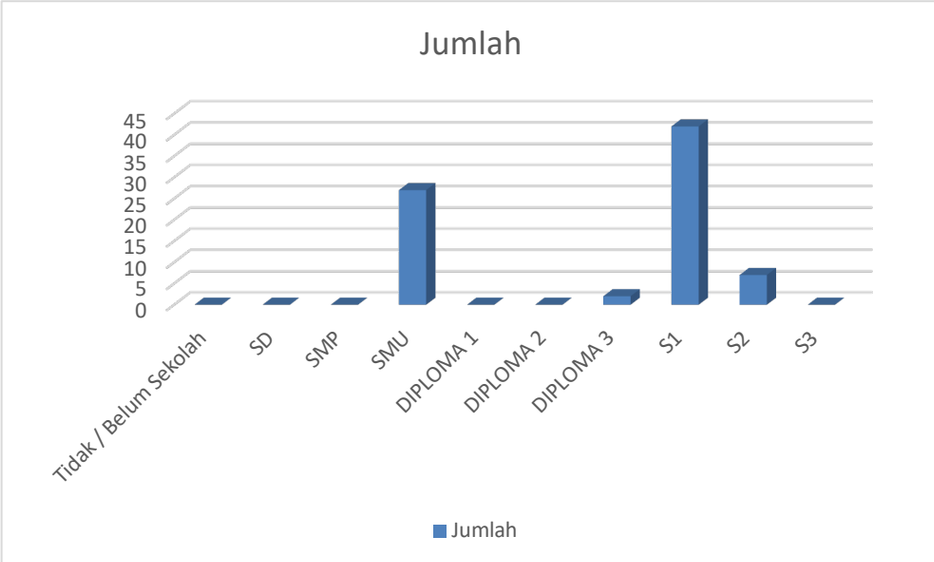

Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

3.1.3. Jenis Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 46% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan mememiliki pekerjaan Swasta.

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi (%)
PNS	17	22
TNI	0	0
POLRI	1	1
SWASTA	36	46
WIRAUSAHA	2	3
TENAGA KONTRAK	2	3
LAINNYA	20	26
TOTAL	78	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

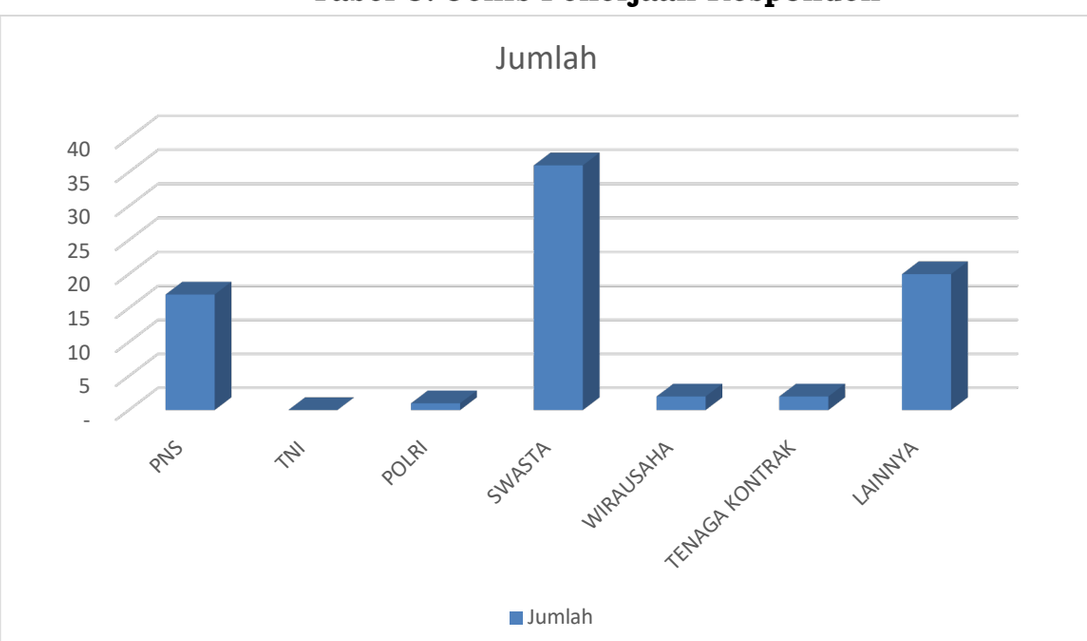

Grafik 3. Jenis Pekerjaan Responden

3.1.4. Domisili Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 96% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki domisili di Sulawesi Utara.

Domisili	Jumlah	Persentasi (%)
Kalimantan Utara	1	1
Sulawesi Utara	75	96
Sulawesi Tengah	1	1
Sulawesi Tenggara	1	1
TOTAL	78	100

Tabel 4. Domisili Responden

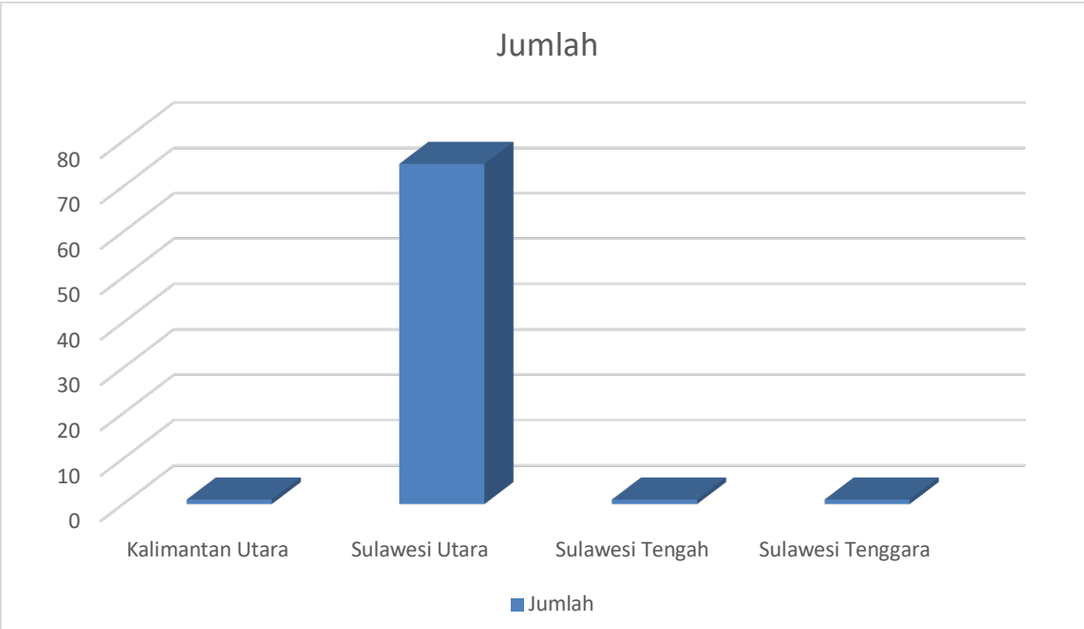

Grafik 4. Domisili Responden

3.1.5. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 50 s/d 59 tahun dengan prosentase sebesar 26%.

Usia	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	14	18
29 - 39 Th	17	22
40 - 49 Th	19	24
50 - 59 Th	20	26
60 - 69 Th	7	9
70 - 100 Th	1	1
Total	78	100

Tabel 5. Usia responden

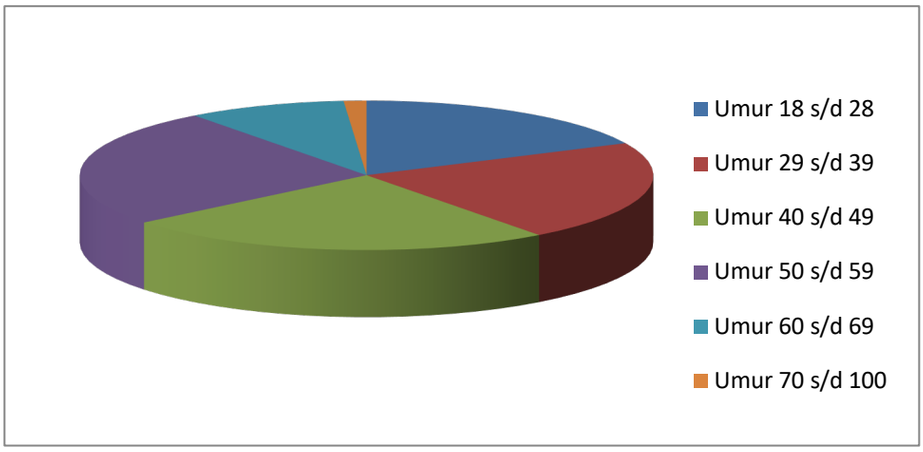

Grafik 5. Usia responden

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manipulasi peraturan pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	1	0
Sering	0	1
Jarang	1	1
Tidak Ada	76	97
Total	78	100

Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

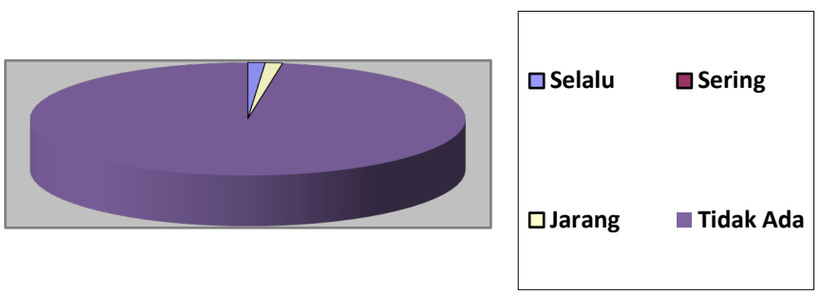

Grafik 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Penyalahgunaan Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	1	1
Sering	0	0
Jarang	1	1
Tidak Ada	76	97
Total	78	100

Tabel 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

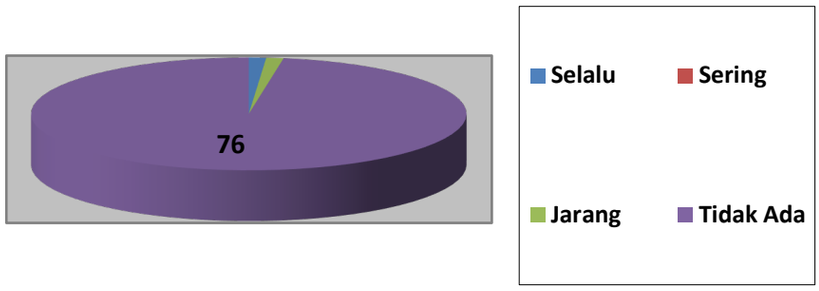

Grafik 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh menunjukkan hasil 94% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Menjual Pengaruh pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	0	0
Sering	2	3
Jarang	3	4
Tidak Ada	73	94
Total	78	100

Tabel 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

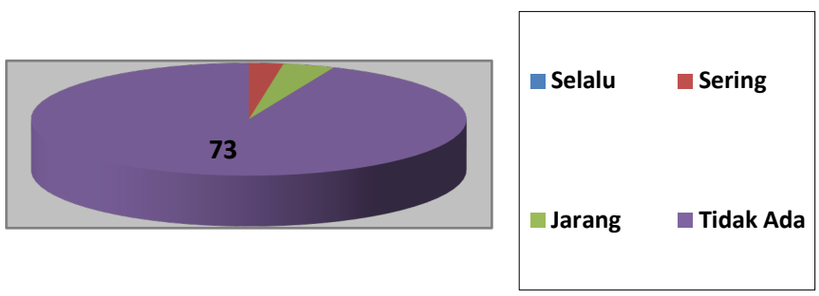

Grafik 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya menunjukkan hasil 94% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa cukup bersih dari

Transaksi Biaya pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	0	0
Sering	1	1
Jarang	4	5
Tidak Ada	73	93,59
Total	78	100

Tabel 9. Indeks pada indikator Transaksi Biaya

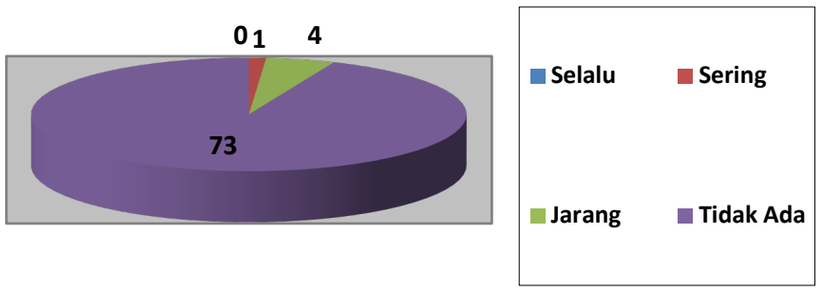

Grafik 9. Indeks pada indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan menunjukkan hasil 97,44% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa cukup bersih dari Biaya Tambahan pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	0	0
Sering	0	0
Jarang	2	3
Tidak Ada	76	97,44
Total	78	100

Tabel 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

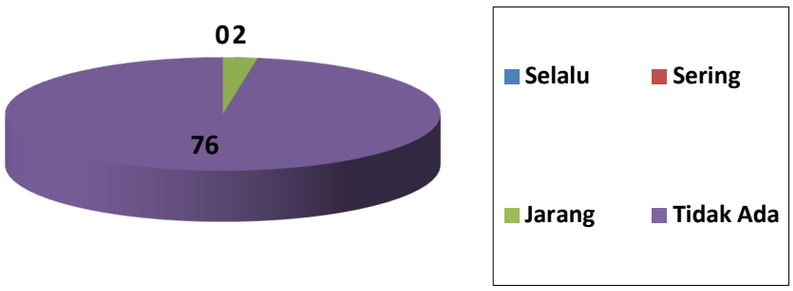

Grafik 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Hadiah menunjukkan hasil 95% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa cukup bersih dari Hadiah

pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	2	3
Sering	1	1
Jarang	1	1
Tidak Ada	74	95
Total	78	100

Tabel 11. Indeks pada indikator Hadiah

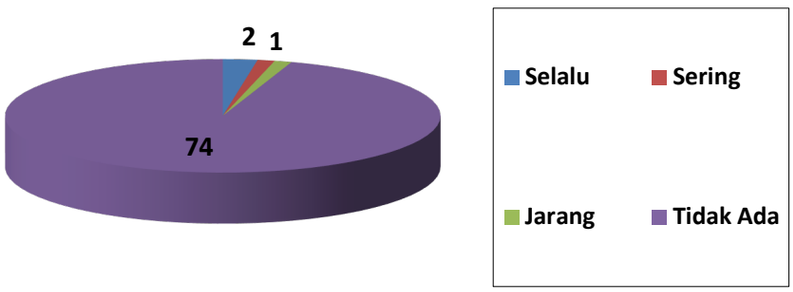

Grafik 11. Indeks pada indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya menunjukkan hasil 95% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa cukup bersih dari Transparansi Biaya pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	1	1
Sering	1	1
Jarang	2	3
Tidak Ada	74	95
Total	78	100

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

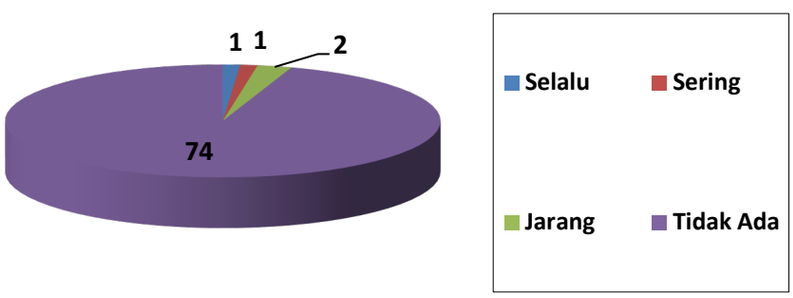

Grafik 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator

Percaloan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Percaloan pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	0	0
Sering	0	0
Jarang	0	0
Tidak Ada	78	100
Total	78	100

Tabel 13. Indeks pada indikator Percaloan

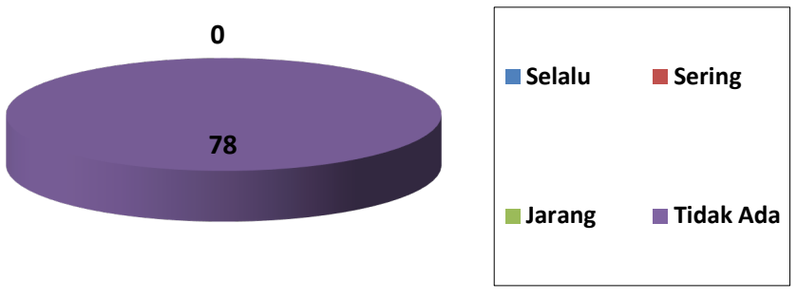

Grafik 13. Indeks pada indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang menunjukkan hasil 95% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Perbuatan Curang pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	0	0
Sering	0	0
Jarang	4	5
Tidak Ada	74	95
Total	78	100

Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

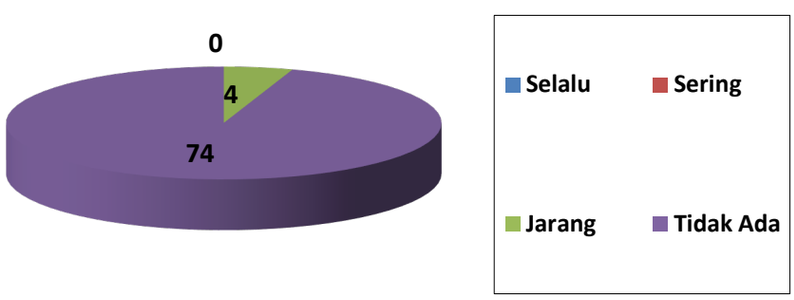

Grafik 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator

Transaksi Rahasia menunjukkan hasil 97% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Transaksi Rahasia pada Pengadilan Tinggi Manado.

Jawaban	Jumlah (Orang)	% (Persen)
Selalu	1	1
Sering	0	0
Jarang	1	1
Tidak Ada	76	97
Total	78	100

Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

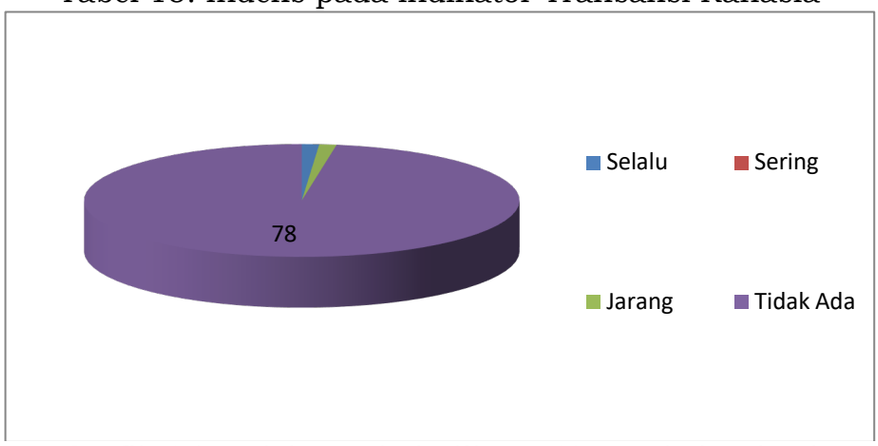

Grafik 15. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado sebesar 3,86.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Urutan
1	Manipulasi Peraturan	3,95	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,95	4
3	Menjual Pengaruh	3,91	9
4	Transaksi Biaya	3,92	7
5	Biaya Tambahan	3,97	2
6	Hadiah	3,89	10
7	Transparansi Biaya	3,91	8
8	Percaloan	4,00	1
9	Perbuatan Curang	3,95	5
10	Transaksi Rahasia	3,95	6

Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi

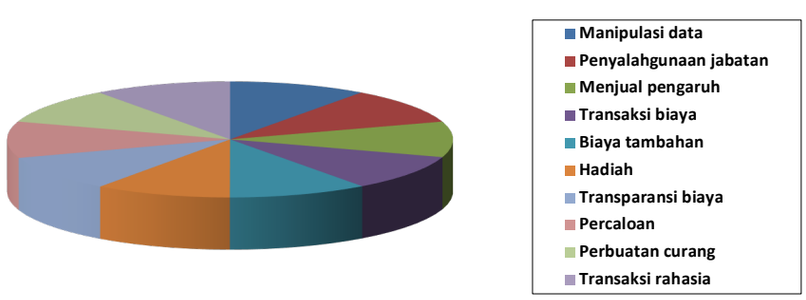

Grafik 16. Indeks Persepsi Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Manado.

Indeks 3,94 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 98,49% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel C. Nilai Persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI, dimana nilai interval Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Secara umum hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Manado diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi sebesar 3,94 atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3,26 – 4.00). Dengan demikian petugas pada Pengadilan Tinggi Manado dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya dari nilai IPAK yang telah diperoleh dari masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Manado maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Tinggi Manado BEBAS DARI KORUPSI.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu: **Hadiah, Menjual Pengaruh, dan Transparansi Biaya** yang dinilai cukup bersih dari korupsi tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan.

4.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki indikator **Hadiah, Menjual Pengaruh, dan Transparansi Biaya** yaitu menampilkan informasi Standar Layanan dan biaya perkara dalam menerima pelayanan Pengadilan Tinggi Manado di website dan mencetak x-banner biaya perkara di ruangan PTSP serta Pengawas PTSP memberikan pembinaan kepada petugas PTSP.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MANADO
Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget Sulawesi Utara
https://www.pt-manado.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,94 / 98,49%

Jumlah	78 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 49	
	PEREMPUAN : 29	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 2
	SMP : 0	S1 : 42
	SMU : 27	S2 : 7
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 17	SWASTA : 36
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 2
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 2
	LAINNYA : 20	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,885
2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,910
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,910

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. **Menampilkan informasi Standar Layanan dan Biaya Perkara di website dan mencetak x-banner Biaya Perkara di ruangan PTSP serta Pengawas PTSP memberikan pembinaan kepada petugas PTSP.**

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Juli 2023
Ketua Pengadilan Tinggi